

Mengatasi Fragmentasi Kepentingan: Ekonomi-Politik Anggaran Publik di Indonesia

Seminar

Subsidi dan Perlindungan Sosial

Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan

Jogja, 4 Desember 2014



Wahyudi Kumorotomo, PhD
Jurusan MKP, Fisipol, UGM

www.kumoro.staff.ugm.ac.id

Pokok Bahasan

1. Korupsi politik dan korupsi birokratis dalam anggaran publik
2. Teori kepentingan: otoritas anggaran sebagai aktor rasional
3. Subsidi BBM, memahami realitas kebijakan energi
4. *Budget punctuation*: pengalihan subsidi yang efektif.

Menurunnya Peran Fiskal Pemerintah

1. Peran APBN dalam peningkatan kemakmuran (pertumbuhan PDB) hanya 8,9% (Radhi, 2012)
2. Kebocoran & korupsi anggaran terjadi di kedua sisi: pendapatan (*revenues*) dan belanja (*expenditure*).
3. Mekanisme APBN dan APBD tidak sinkron.
4. Sebagian besar anggaran publik tersedot untuk subsidi energi dan biaya operasional birokrasi (gaji, pengeluaran rutin).
5. Prioritas pembangunan belum menyentuh kebutuhan dasar rakyat.
6. Daya serap anggaran turun, sisa anggaran tidak dapat dipergunakan, akuntabilitas anggaran rendah.

Bocor Sebelum Masuk Anggaran

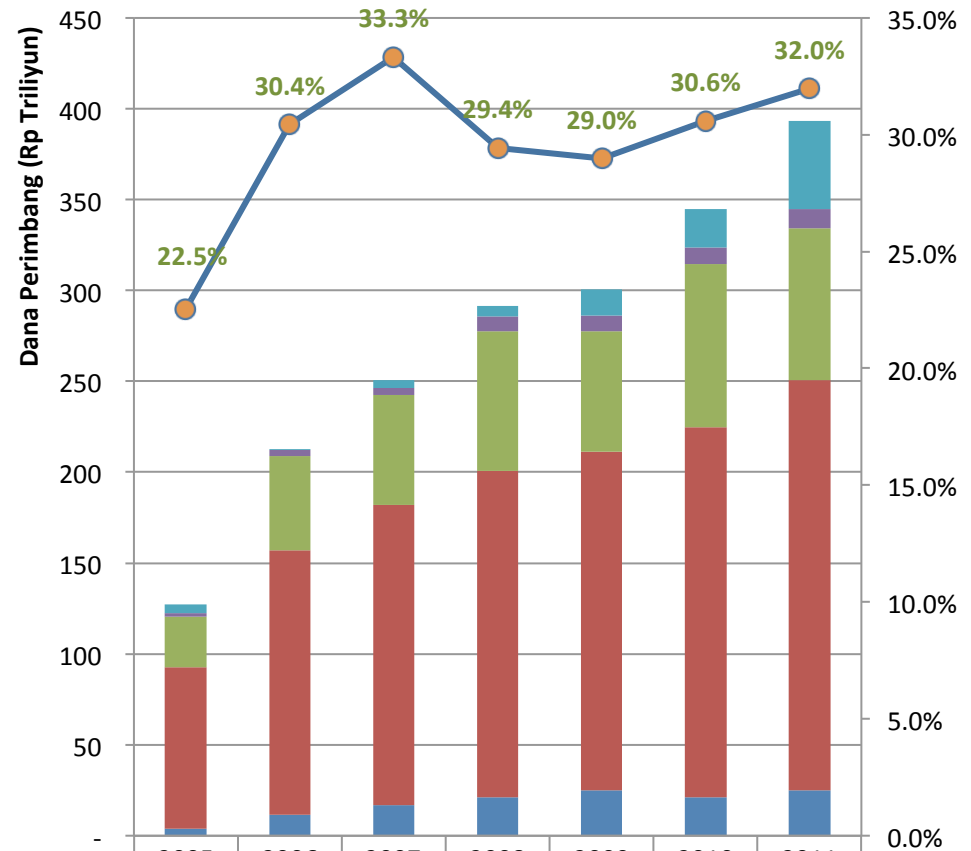
- Rp 300 triliun per th uang pajak yang dibayar rakyat digerogeti mafia pajak.
- Kasubdit Investigasi Pajak (Darussalam): Total berkas kasus yang harus diselesaikan th 2011 ada 14.208 kasus. “Hasil sidang di pengadilan pajak tidak bisa diakses umum atas alasan kerahasiaan wajib pajak” → rawan penyimpangan & penyalahgunaan.
- Kasus Gayus: Yang disidik baru 4 perusahaan (PT Surya Alam Tunggal Sidoarjo, PT Dowell Anadrill Schlumberger, PT Exelcomindo, dan PT Indocement Tunggal Prakasa). Bgm dg 149 perusahaan yg “digarap” Gayus?
- Daniel Kaufmann: “Penyuapan dalam sistem peradilan di Indonesia lebih tinggi ketimbang negara-negara yang dikuasai oleh agen / mafia narkoba atau bekas negara komunis”.

Bocor Ketika Keluar dari Anggaran

- Korupsi politik: melibatkan politisi di DPR, Kementerian, Parpol, pejabat Pemda dan DPRD.
- Dana APBN banyak digunakan untuk kepentingan Parpol, digeroogi untuk berbagai macam “fee”, tidak fokus pada kebutuhan rakyat.
- Biaya birokrasi semakin membengkak, belanja modal untuk kepentingan publik menyusut.
- Dana APBD banyak digunakan untuk politik uang pejabat petahana, biaya prosedural politik yg mahal, untuk dana taktis KDH, dsb.
- Kebijakan publik mengarah ke kepentingan individu & kelompok, bukan kepentingan publik.

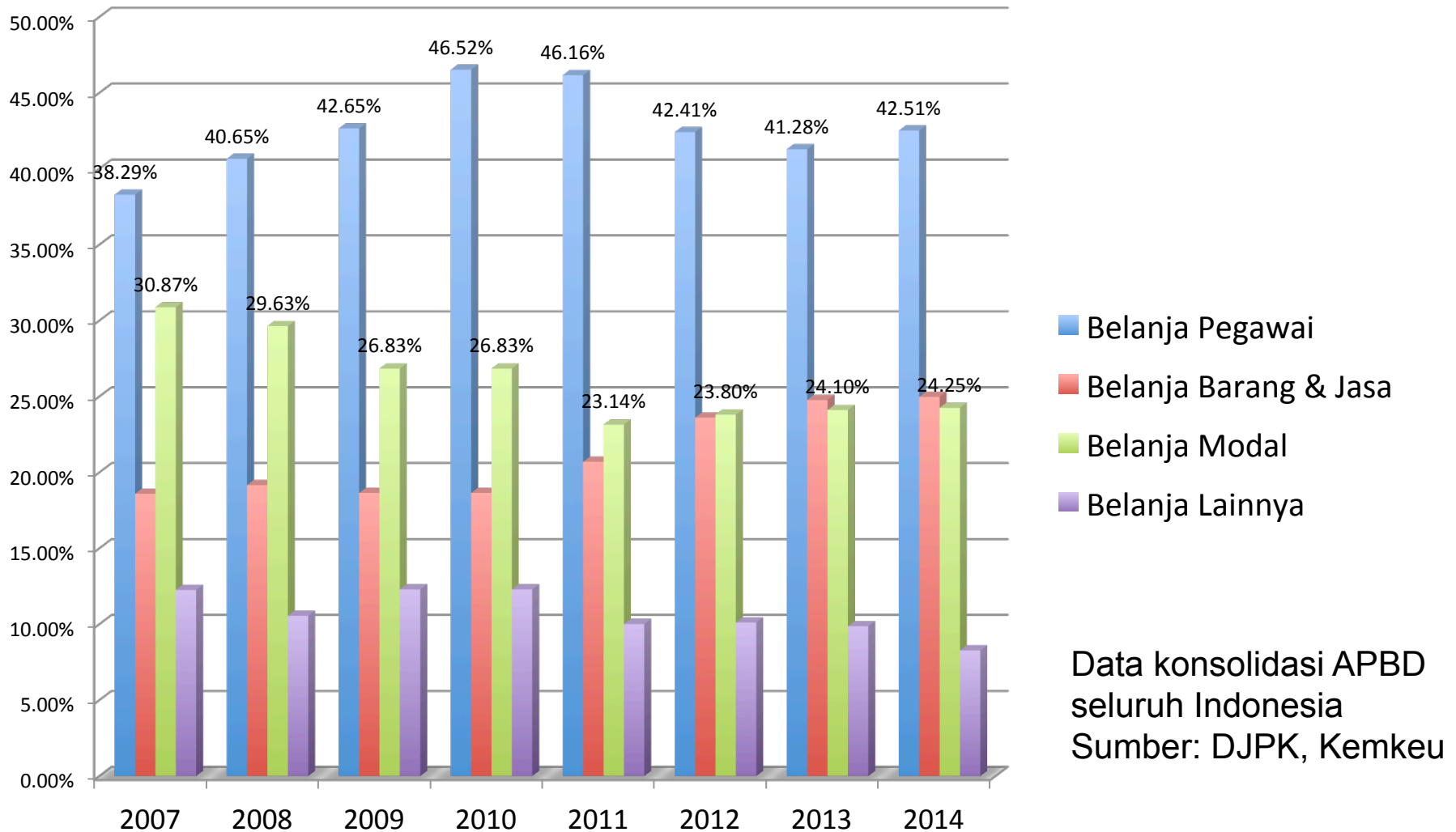
Dana Penyesuaian = “Gentong Babi”

- Alokasi dana “gentong babi” (*pork barrel*) dikritik habis-habisan oleh publik pada th 2005. Tapi DPR tetap jalan terus dg berbagai alasan.
- Pada TA 2014, Dana Penyesuaian mencapai Rp 87,9 triliun sedangkan DAK hanya Rp 33,0 triliun.



Dana Penyesuaian	4,703	301	4,362	5,806	14,490.0	21,150.0	48,235
Otsus	1,775	3,488	4,046	8,180	8,857	9,099.6	10,421
DBH	27,977	51,638	60,502	76,585	66,073	89,618	83,558
DAU	88,766	145,664	164,787	179,507	186,414	203,607	225,533
DAK	4,014	11,570	17,048	21,202	24,820	21,138.4	25,233
% Dana Perimbangan Thd APBN	22.5%	30.4%	33.3%	29.4%	29.0%	30.6%	32.0%

APBD Kurang Pro-Publik




Teori Kepentingan dlm Anggaran

- Rubin (2006): *"budgets reflect relative proportions of decisions made for constituency purposes"*. → Teori ini tidak berlaku di Indonesia karena otoritas anggaran adalah "aktor rasional" yg dibebani lebih banyak *"vested interest"*, bukan *"public interest"*.
- Alokasi anggaran menjadi objek *"rent-seeking activities"*.
- Tullock (1965), Niskanen (1971), Blais & Dion (1991): Setiap pengguna anggaran adalah *"budget maximizer"*.

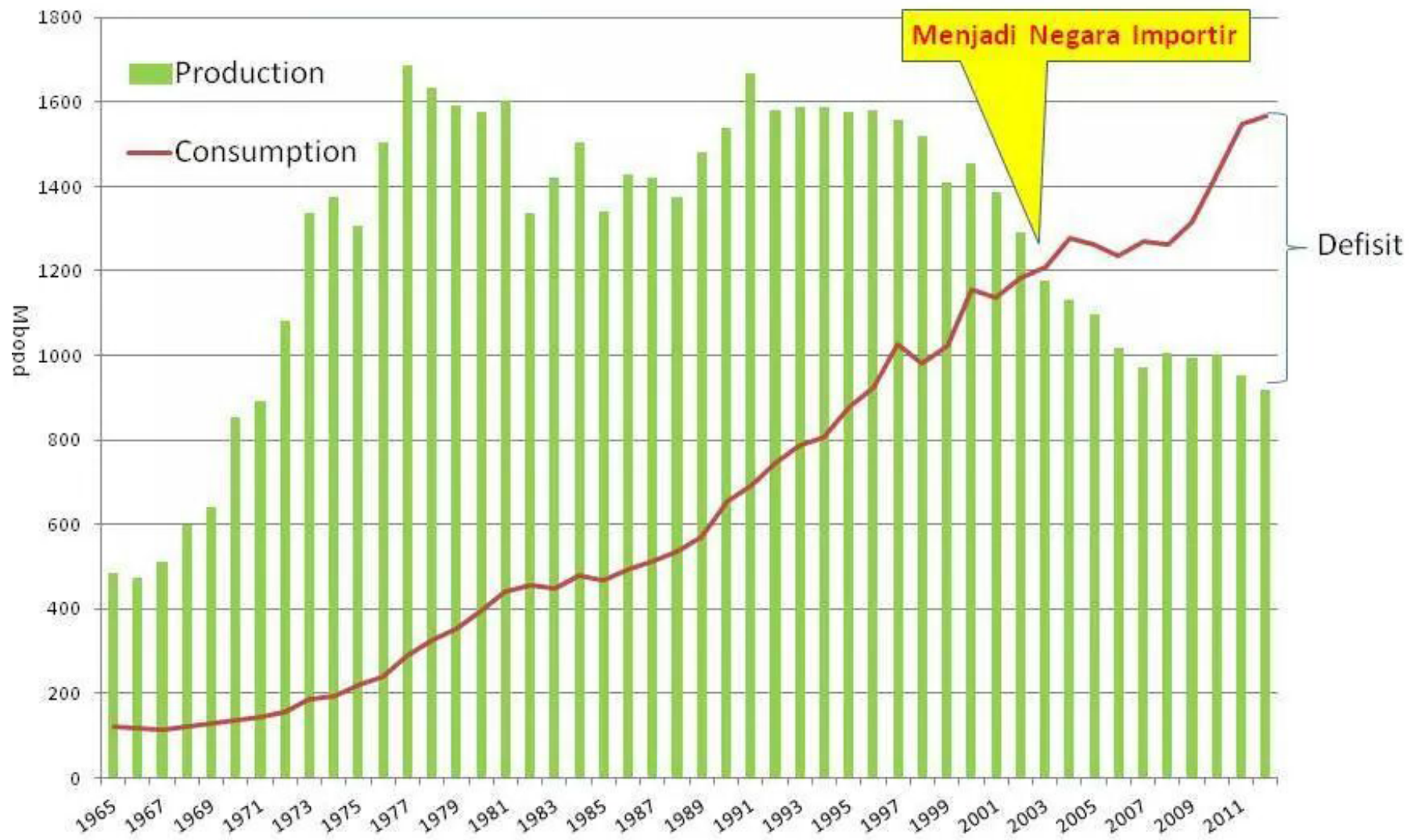
Analisis Kepentingan Stakeholders

- **KEPALA DAERAH**
Bagaimana agar terpilih dan menjabat lagi (+ visi KDH terwujud)
- **DPRD**
Bagaimana agar terpilih dan menjabat lagi (+ mampu mewujudkan kewajiban DPRD)
- **TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH = TAPD**
Bagaimana agar SKPD makin EKONOMIS, EFISIEN tetapi semakin EFEKTIF (3E)
- **SKPD**
Getting money first
- **PIMPINAN KEGIATAN**
Berhemat dan mampu meng-SPJ-kannya
- **MASYARAKAT dan atau POKMAS PEMERHATI / PEDULI**
(Semua) Layanan publik yang murah bahkan gratis, responsif, cepat, relevan, antisipatif, 3E, terjangkau (aksesibilitas), berkualitas, dan lain-lain.

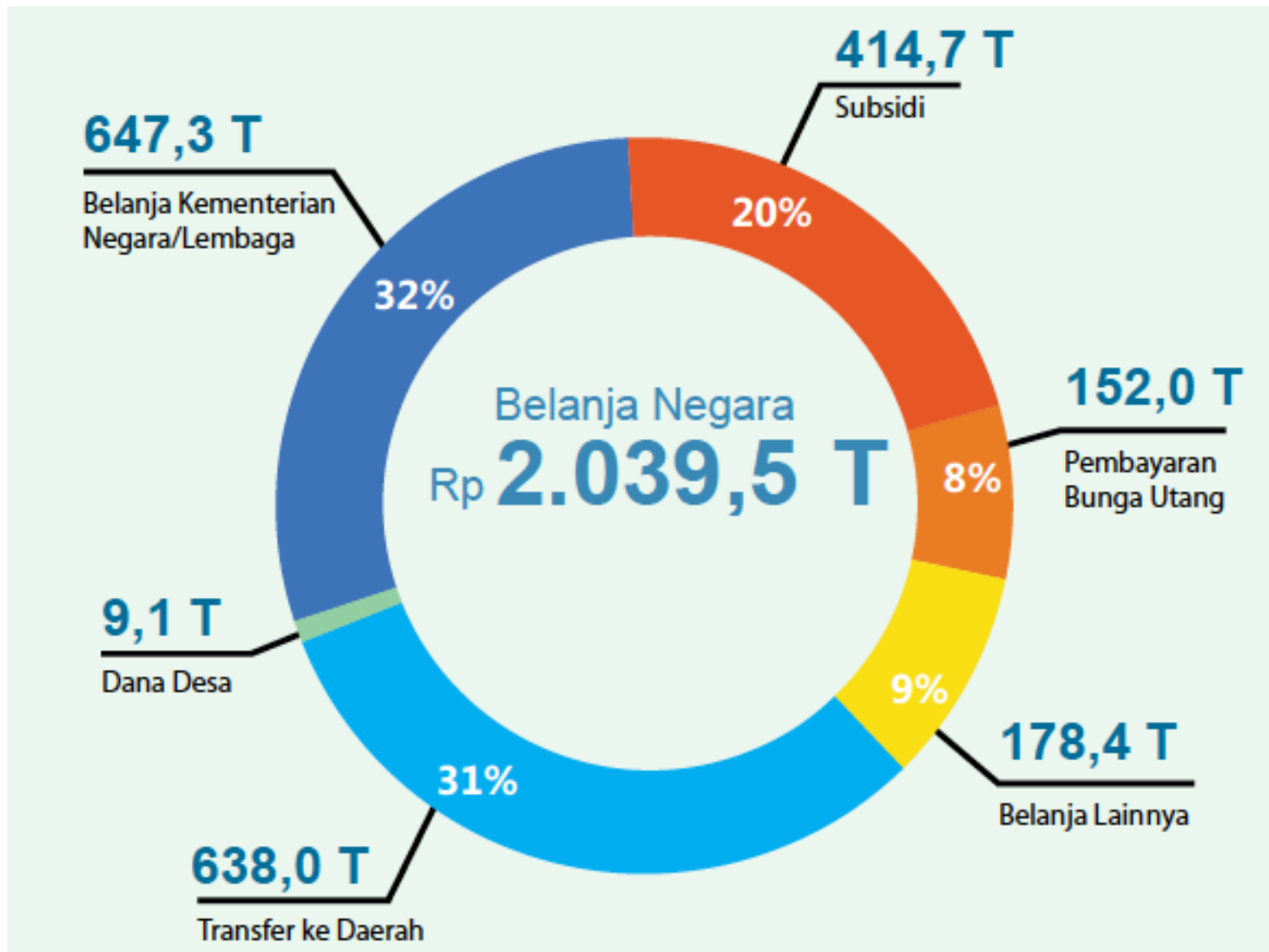


Untuk mewujudkan kewajiban daerah, apakah kepentingan dapat diserasikan?

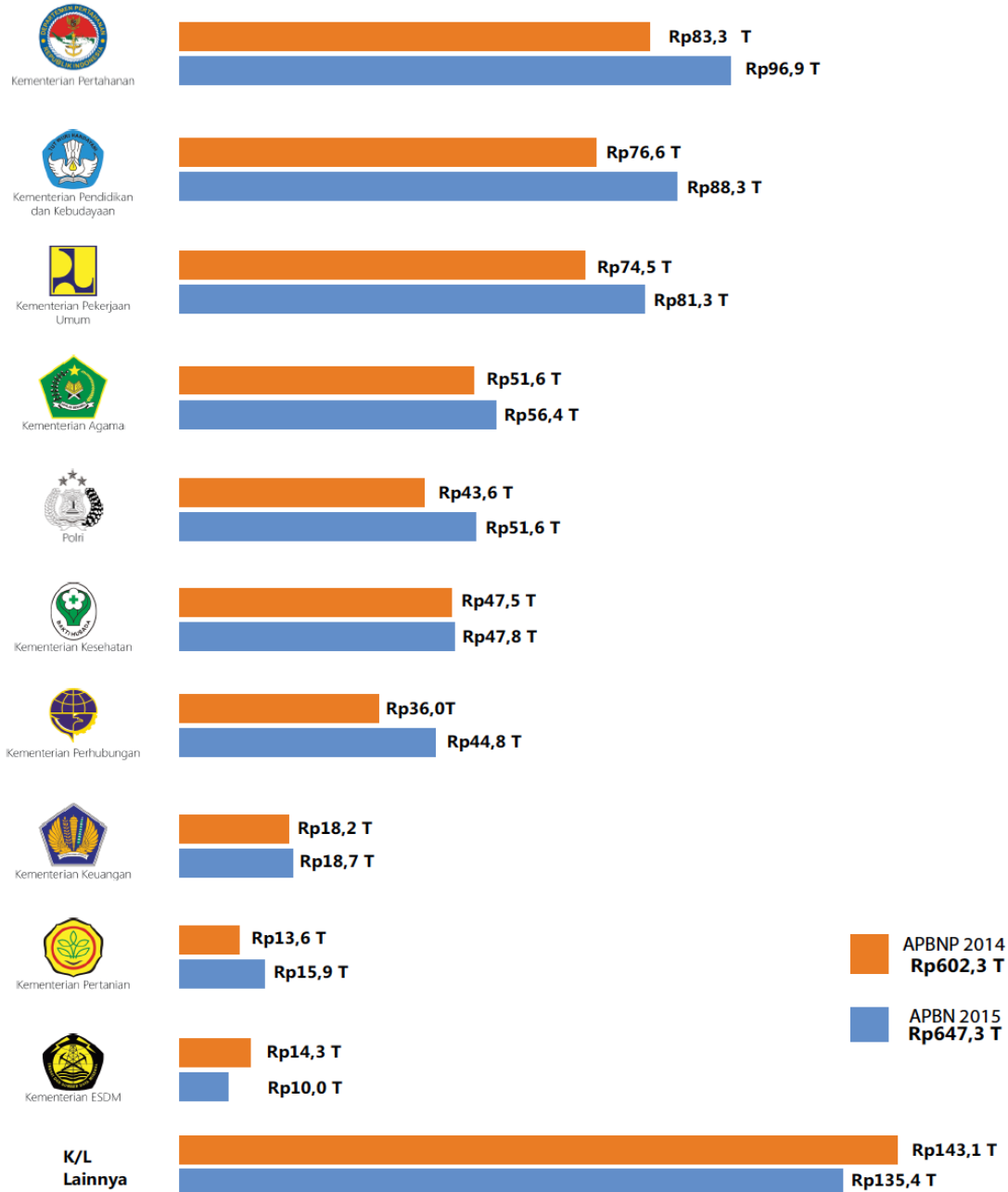
Profil Produksi dan Konsumsi Minyak Indonesia 1965 – 2012



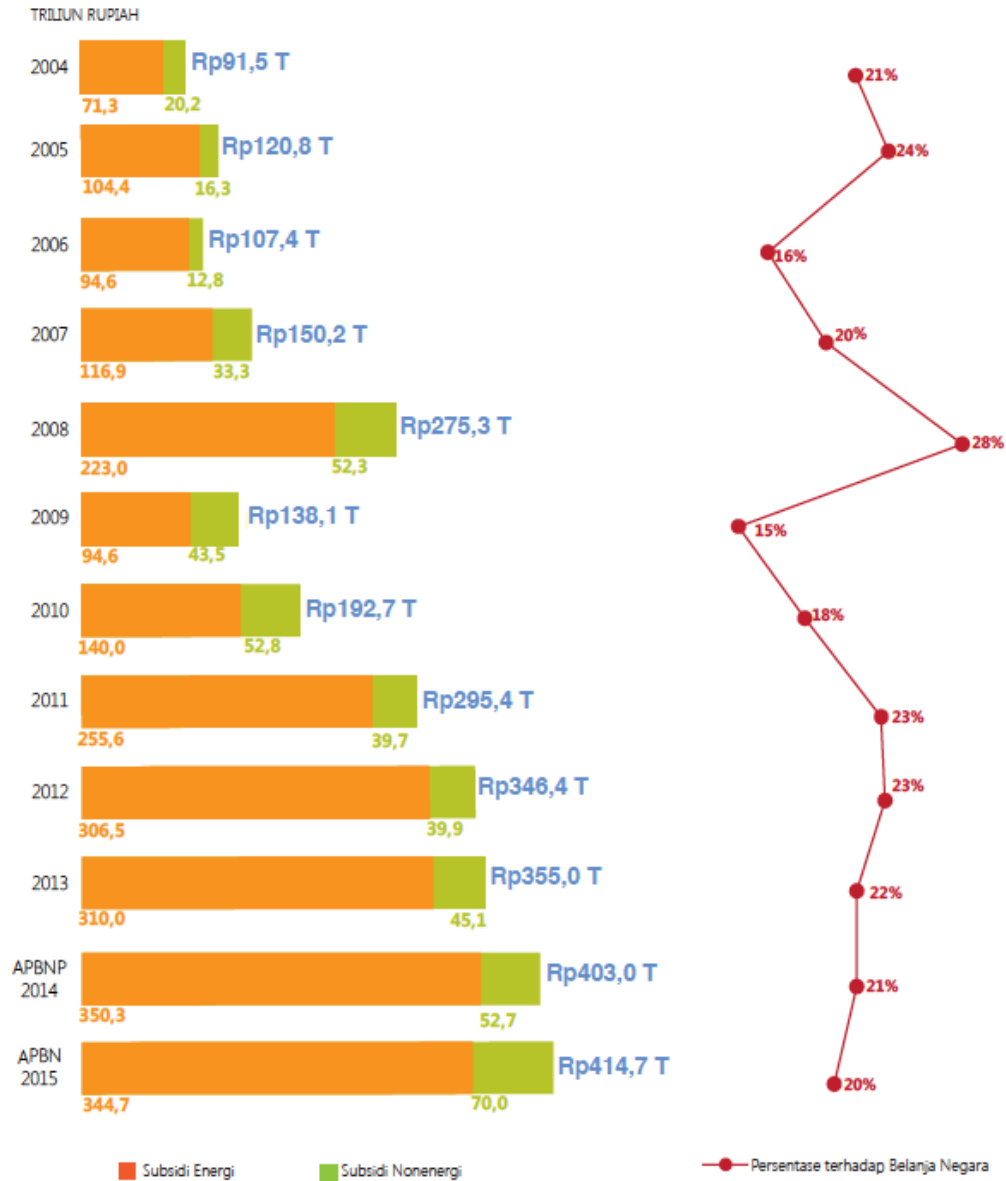
Belanja APBN 2015



Belanja Kementerian



Subsidi Energi Terlalu Besar

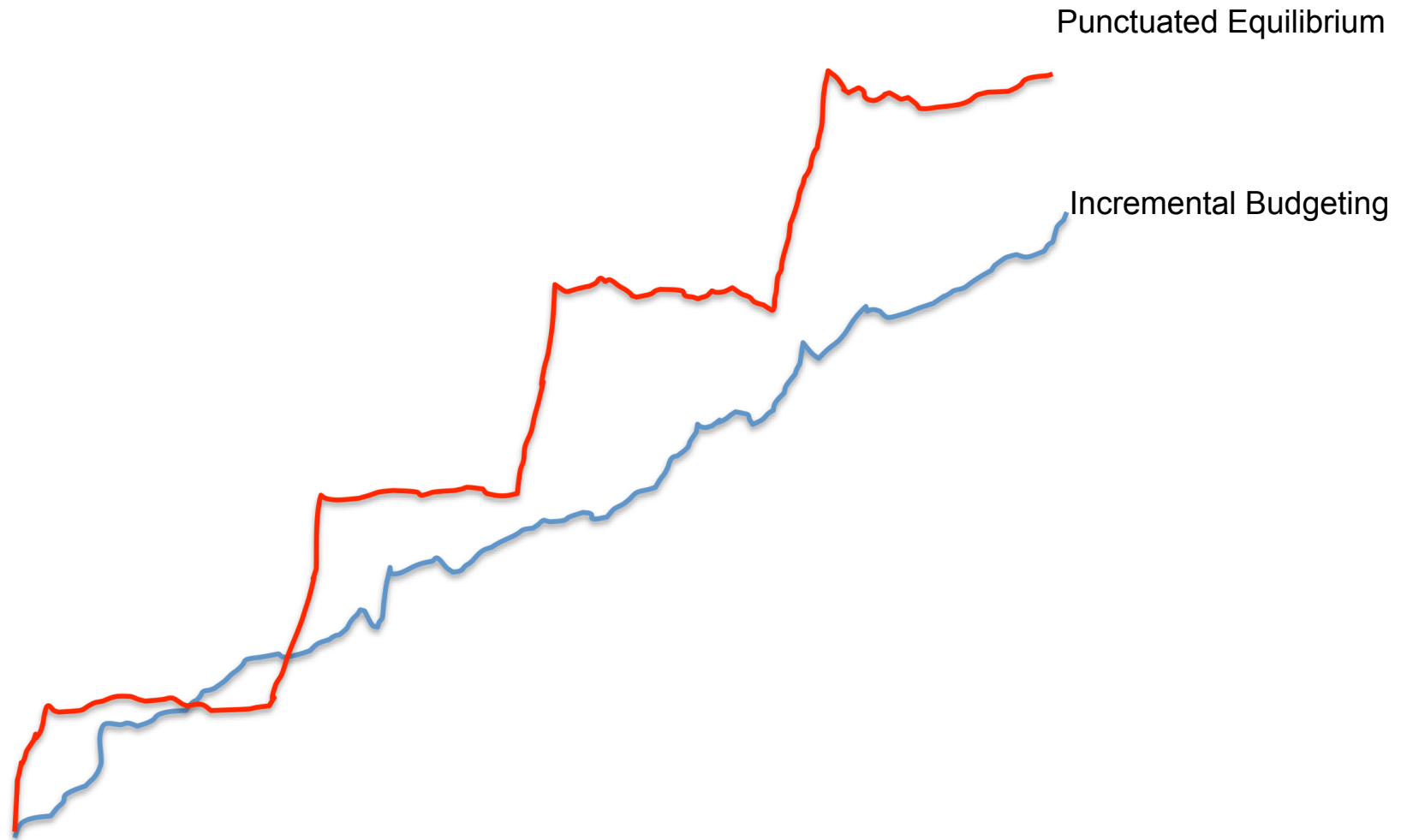


**SUBSIDI NONENERGI, APBNP 2014 DAN RAPBN 2015
(miliar rupiah)**

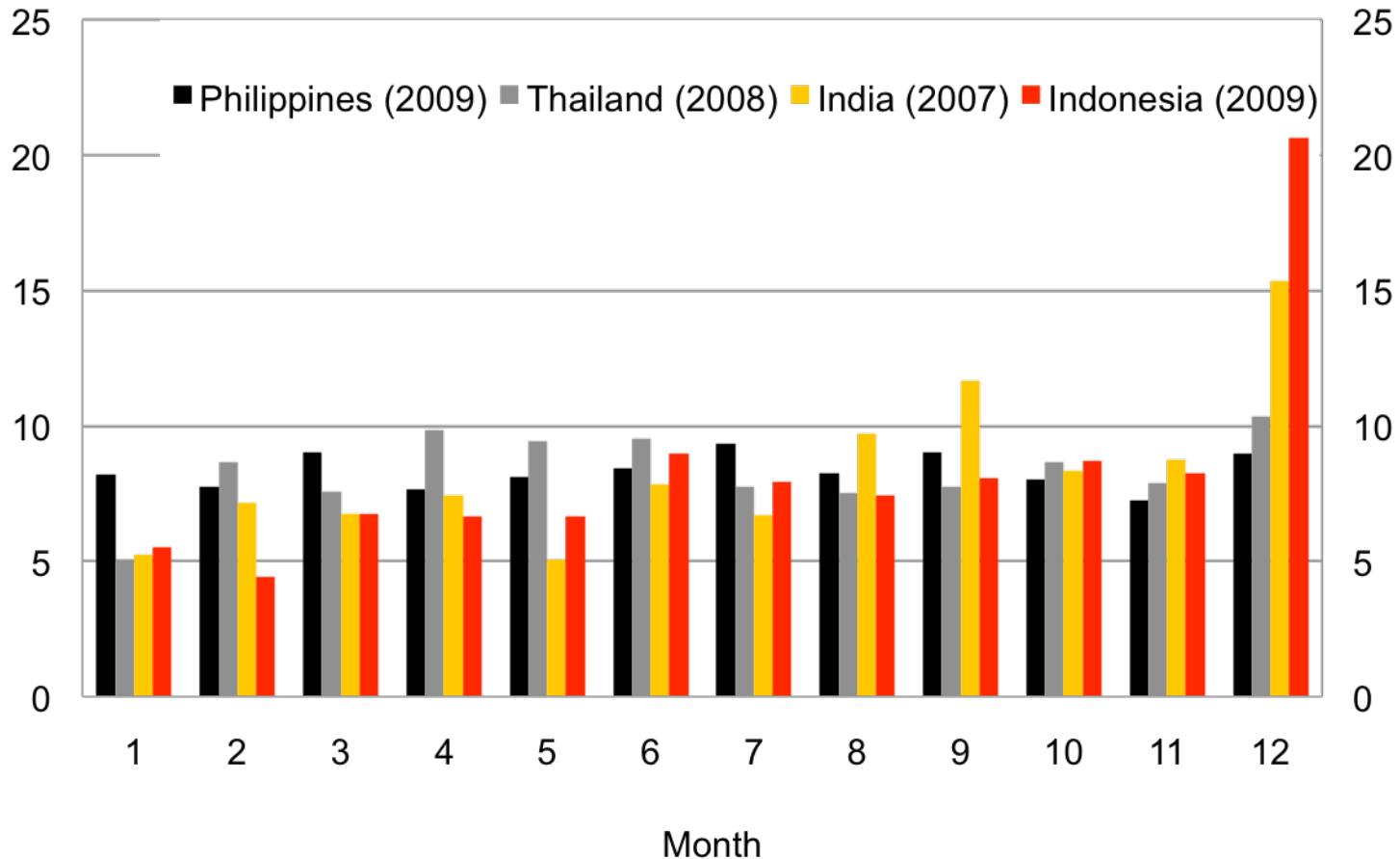
No	URAIAN	2014 APBNP	2015 RAPBN
1.	Subsidi Pangan	18.164,7	18.939,9
2.	Subsidi Pupuk	21.048,9	35.703,1
3.	Subsidi Benih	1.564,8	939,4
4.	Subsidi PSO	2.197,1	3.261,3
	a. PT KAI	1.224,3	1.523,8
	b. PT Pelni	872,8	1.607,2
	c. LKBN Antara	100,0	130,3
5.	Subsidi Bunga Kredit Program	3.235,8	2.484,0
6.	Subsidi Pajak	6.513,8	8.650,0
Jumlah		52.725,1	69.977,7

Sumber: Kementerian Keuangan

Punctuation vs. Incremental Budgeting

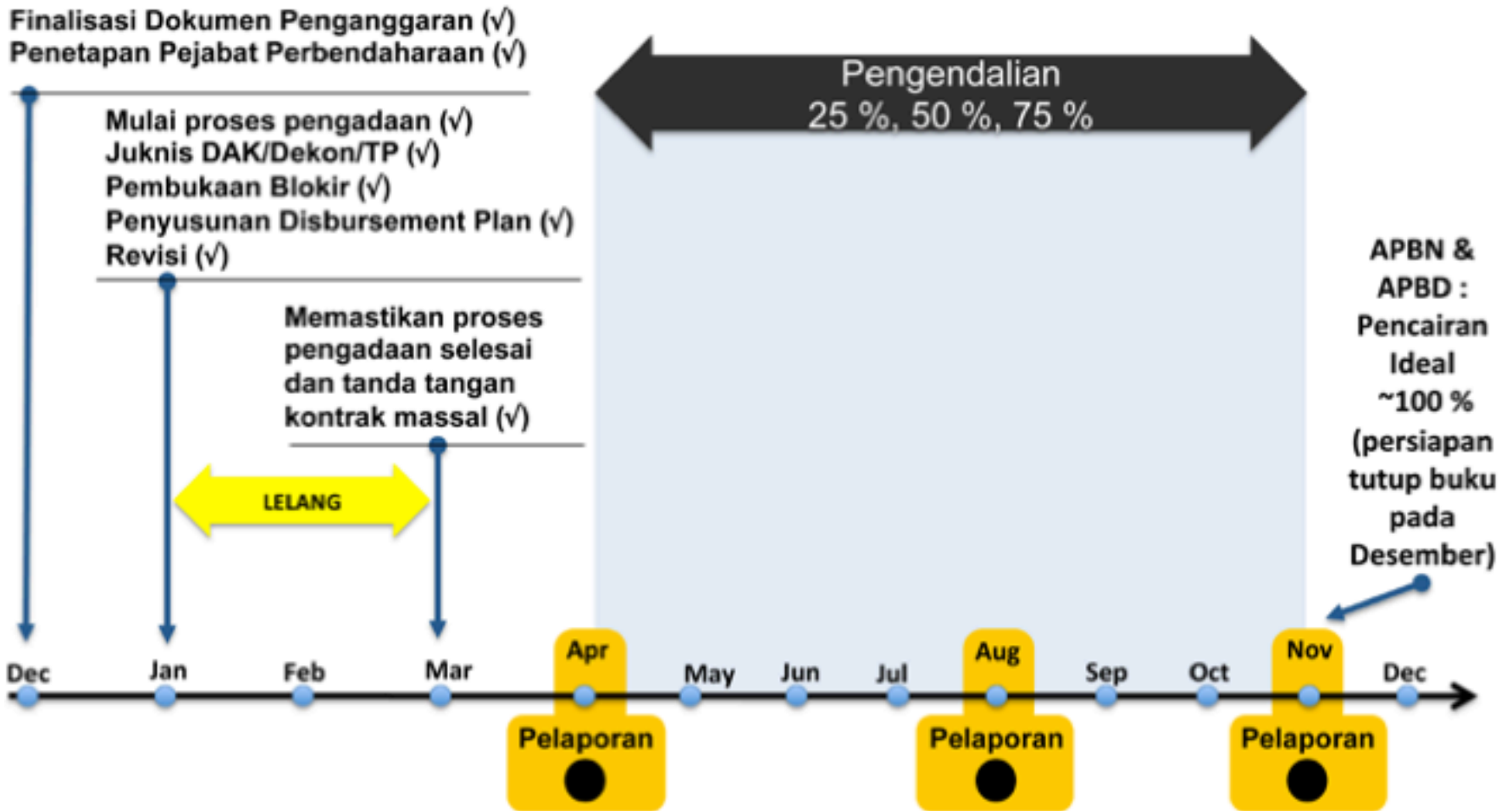


Penyerapan DIPA lebih Lambat dari Negara Lain



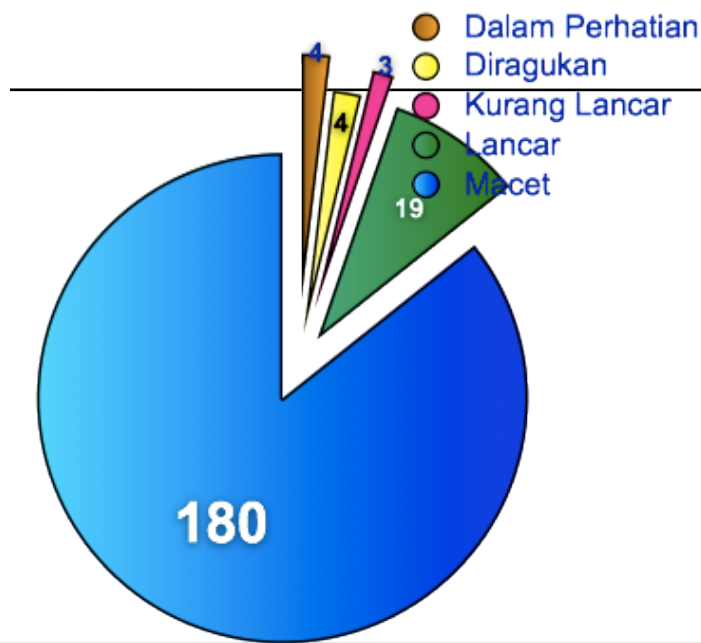
Source: CEIC, World Bank

Apakah kebijakan *debottlenecking* kurang efektif...

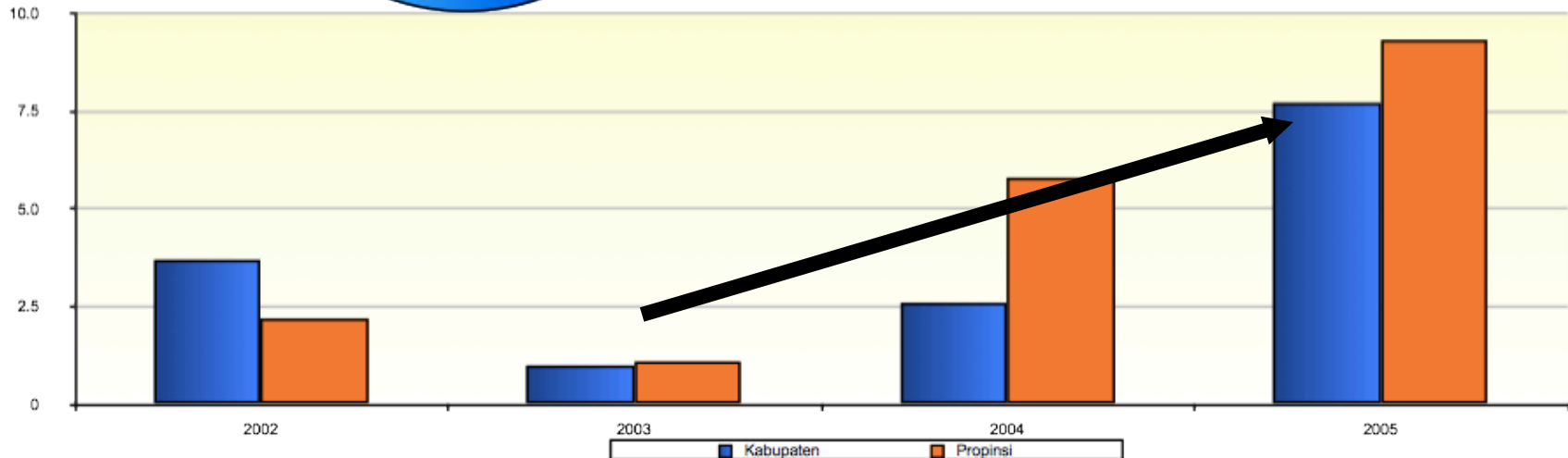
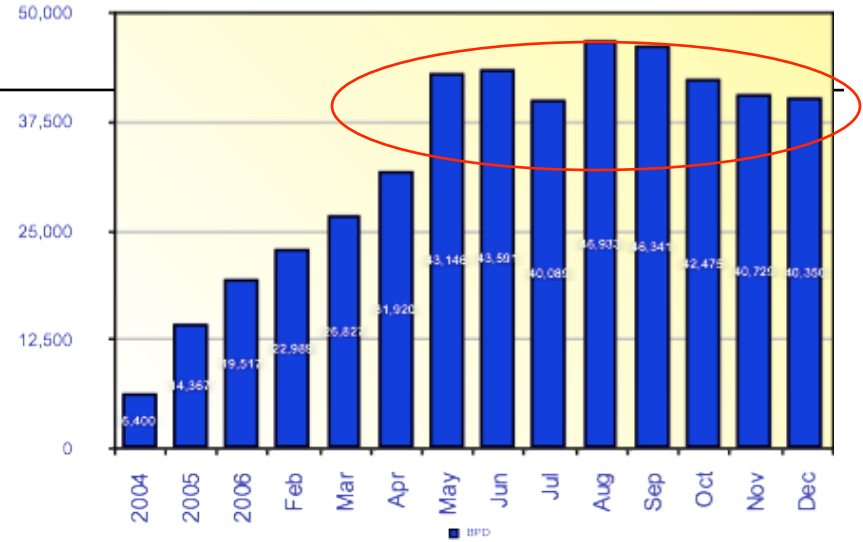


Surplus dana APBD di Daerah lebih banyak masuk SBI, bukan untuk investasi...

Jumlah PDAM per Status Kredit



Nilai Pemilikan SBI 1 Bulan dari BPD



Alokasi Belanja di Daerah Kurang Efektif

Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	% Penyelesaian Kegiatan		
		TW 1	TW 2	TW 3
215	1283	0,25	3,10	11,05
		(3 kegiatan)	(41 kegiatan)	(142 kegiatan)

Catatan Tim Monev Pemprov DIY :

1. Deviasi antara target dan realisasi (fisik & keuangan) sangat lebar, deviasi keuangan tertinggi 38,95%, Deviasi Fisik tertinggi 25,69% yang keduanya terjadi pada Triwulan III.
2. Pada Triwulan 4 harus menyelesaikan 1141 kegiatan
3. Kondisi yang demikian apakah sudah cukup baik dari sisi perencanaan?

- Subsidi tidak lagi dapat dialokasikan secara menyeluruh, tetapi harus terfokus dan selektif pada yang membutuhkan.
- Anggaran publik lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan individu pejabat dan kepentingan sempit lainnya. Ini bertentangan dengan azas demokrasi substantif bahwa “*public policy must be based on public consent*”.
- Pola belanja anggaran publik menghendaki perubahan radikal. Prioritas belanja dalam APBN dan APBD pada akhirnya berpengaruh terhadap kualitas pembangunan di Indonesia.

TERIMA KASIH